

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan Internasional sebagai sebuah studi mendefinisikan dirinya sebagai sebuah kajian yang memfokuskan kajiannya pada berbagai interaksi yang melintasi berbagai batas negara (Brown dan Ainley, 2005:5). Interaksi tersebut dapat terjadi dalam berbagai interaksi di berbagai bidang baik level individu hingga negara-bangsa (Brown dan Ainley, 2005:5). Interaksi tersebut dapat bersifat kooperasi maupun konfliktual dalam berbagai aspek meskipun Studi Hubungan Internasional (SHI) tradisional lebih memfokuskan kajiannya pada interaksi antar pemerintah negara-negara berdaulat sebagai entitas tertinggi dalam bidang politik dan militer (Choucri, 2015:3). Salah satu instrumen negara untuk menciptakan interaksi tersebut dapat dilakukan dengan diplomasi tradisional (*government to government*), ataupun diplomasi publik jika sasarannya adalah masyarakat luar negeri (*government to people*).

Aktivitas diplomasi publik yang dilakukan oleh suatu negara kerap kali memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar negeri untuk ikut terlibat di dalamnya. Namun, disadari atau tidak, diplomasi publik tersebut memiliki motif politik dan strategis yang ingin diperoleh negara, seperti menjaga dan meningkatkan hubungan kedua negara. Motif politik dan strategis tersebut dapat diwujudkan dengan mendekati tokoh masyarakat/pemangku kepentingan (aktor

non-negara) akar rumput luar negeri – diplomasi publik. Salah satu medianya adalah program pertukaran tokoh-tokoh keagamaan kedua negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Perwakilan Diplomatik Negara tersebut dengan lembaga-lembaga pendidikan/universitas.

Diplomasi publik yang menggunakan program pertukaran kerap dilakukan negara kepada tokoh masyarakat luar negeri. Seperti Amerika Serikat pada tahun 2010 melalui program *Study of the U.S. Institutes for Student Leaders* (SUSI) dengan tujuan mempromosikan pluralisme agama (Haryanto, 2013); ASEAN-Jepang pada tahun 2008 melalui program *Asean-Jenesys (ASEAN-Japan East Asia Network of Exchange for Student and Youth)* dengan tujuan memberikan landasan kuat bagi terciptanya hubungan kerjasama ASEAN-Asia Timur di masa yang akan datang (Kementerian Luar Negeri RI. 2008. *Program Asean-Jenesys*; dan Australia pada tahun 2017 melalui program *Australia –Indonesia Muslim Exchange Program* (MEP) dengan tujuan meningkatkan saling pengertian, kerjasama dan toleransi antara Australia dan Indonesia (<https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Program-Asean-Jenesys-Asean-Japan-East-Asia-Network-of-Exchange-for-Students-And-Youths-Tahap-II-Dan.aspx> diakses pada 12 Mei 2018).

Aktivitas diplomasi publik Australia terhadap Indonesia tidak bisa dipisahkan dari bagaimana Australia memposisikan Asia Pasifik sebagai kawasan strategis. Pada tahun 2008, Australia di bawah kepemimpinan Kevin Rudd mengumumkan sikap politik luar negerinya untuk meningkatkan kerjasama multilateralisme di Asia Pasifik. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh berkembang

institusi kerjasama kawasan yang semakin mempererat hubungan negara-negara di Asia Pasifik dan Asia Timur; seperti ada keberadaan ASEAN, ASEAN+3 , ARF, APEC, East Asia Summit dan ASEAN-CHINA Free Trade Area. Kondisi tersebut memiliki nilai strategis karena tidak hanya mempererat dan meningkatkan keamanan di antara anggota, namun memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi bagi Australia (<https://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/rp/2009-10/10rp13.pdf> diakses pada 13 Mei 2018).

Indonesia memiliki nilai politik dan ekonomi yang penting bagi Australia. Hal tersebut menjadi dasar bagi Australia untuk memelihara dan meningkatkan hubungan baik dengan Indonesia. Secara politik, Indonesia dinilai memiliki peran signifikan sebagai *regional leader* di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam forum kawasan ASEAN (Smith, 1999: 239). Selain itu, Indonesia pun aktif terlibat dalam forum-forum kerjasama kawasan yang telah disebutkan di atas. Pada konteks kontemporer, hubungan Australia-Indonesia dapat dilihat sebagai kunci stabilitas Asia Pasifik. Pandangan tersebut disampaikan oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (<http://www.tribunnews.com/australia-plus/2017/10/26/hubungan-australia-indonesia-kunci-stabilitas-asia-pasifik>

diakses pada 13 Mei 2018):

“Kedua negara menghadapi lingkungan geopolitik yang menjadi lebih cair dan bahkan mudah berubah dalam beberapa tahun terakhir.... kepercayaan strategis menurun tajam, persaingan kembali terjadi, dan pendekatan berbahaya menjadi pilihan, banyak ketidakpuasan dan ketidakstabilan dalam politik global.... Indonesia dan Australia dapat bekerjasama untuk memastikan keseimbangan dinamis di kawasan ini, di mana kemitraan tidak akan menghasilkan konflik baru, ketegangan lebih besar, dan kembalinya divisi merugikan era perang dingin.”

Lebih lanjut, dalam aspek ekonomi, Indonesia menempati urutan ke-dua sebagai sumber impor atau pasokan bagi Australia. Adapun beberapa produk yang diekspor Indonesia pada tahun 2016 meliputi kebutuhan industri (US\$ 23.98 miliar), produk farmasi (US\$ 7 miliar), produk medis (US\$ 7.15 miliar), batu berharga (US\$ 7.01 miliar), peralatan olahraga dan mainan (US\$ 2.12 miliar), pesawat (US\$ 2.03 miliar), makanan (US\$ 1.72 miliar), produk kimia (US\$ 1.65 miliar), minuman (US\$ 1.5 miliar), mesin (US\$ 25.01 miliar), mesin elektronik (US\$ 18.47 miliar), produk besi/baja (US\$ 3.82 miliar), dan barang lainnya (US\$ 1.6 miliar). Kemudian, total perdagangan antara Australia-Indonesia mencapai US\$ 342.18 miliar pada periode Januari – November 2016, hal tersebut mengalami penurunan 4.23% dibandingkan periode 2015 yang mencapai US\$ 357.29 miliar. Meskipun terdapat penurunan volume perdagangan antara tahun 2015 dan 2016, namun hal tersebut tidak dapat ditafsirkan bahwa hubungan kedua negara merenggang karena kedua negara mencatatkan nilai yang cukup besar dari aspek perdagangan (<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2018/02/06/report-1517900324.pdf> diakses pada 13 Mei 2018).

Kedua penjelasan di atas memiliki keuntungan tersendiri bagi Australia dalam aspek politik maupun ekonomi. Upaya yang dilakukan oleh Australia tidak sebatas melalui saluran diplomasi tradisional atau melalui kerangka kerjasama antar negara yang sifatnya elitis. Australia pun menggunakan saluran lain, yakni *government to people* atau *people to people* dengan tujuan mendekati masyarakat Indonesia. Pentingnya peran masyarakat (*people*) dalam hubungan internasional didasarkan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengubah kebijakan suatu

negara dan potensial menjadi pengambil kebijakan di masa depan. Oleh karena, Australia gencar melaksanakan kegiatannya diplomasi publiknya, seperti menggunakan media massa, perguruan tinggi (Byrne dan Hall, 2013: 37 – 41), atau budaya (Mar, 2014: 47). Pada penelitian ini, peneliti akan fokus pada program pertukaran tokoh-tokoh Islam/Muslim kedua negara.

Kemunculan program *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program* (MEP) tidak bisa dilepaskan dari konteks dinamika hubungan luar negeri Australia-Indonesia. Sejak mengakui kemerdekaan Indonesia secara *de facto* pada 9 Juli 1947, Australia merupakan salah satu negara Barat yang mendukung pengakuan kemerdekaan Indonesia di tingkat global. Hal tersebut dibuktikan dengan diusulkannya isu dekolonisasi Indonesia dari Belanda oleh Australia sebagai agenda politik dalam sidang UNSC (*United Nation Security Council*) tahun 1947, dan dipilihnya Australia sebagai wakil Indonesia dalam Perjanjian Renville pada tahun 1948. Peran Australia dalam memperjuangkan pengakuan Indonesia di tingkat global membuahkan hasil, pada tahun 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara penuh (Mortimer, 1976: 172).

Hubungan antara Indonesia dan Australia mulai merenggang ketika memasuki tahun 1950an atau periode Perang Dingin. Secara konstelasi politik internasional, Australia berada di Blok Barat dan Indonesia tidak memosisikan dirinya di antara kedua Blok Politik yang bertikai. Meskipun demikian jika dilihat dari kondisi politik dalam negeri Indonesia, Partai Komunitas Indonesia (PKI) sangat erat hubungannya dengan Presiden Soekarno. Hal tersebut menjadi kekhawatiran pengambil kebijakan di Australia akan potensi Indonesia menjadi

bagian dari Blok Timur. Hubungan Australia-Indonesia semakin renggang ketika pada tahun 1961 Indonesia dibawah Soekarno menganeksasi Papua Barat dan memberlakukan kebijakan *konfrontasi* terhadap Malaysia dari tahun 1964 sampai 1966. Australia menilai tindakan Indonesia tersebut sebagai kebijakan yang ekspansif dan selama konfrontasi tersebut, Australia memberika memberikan bantuan militer (personil dan logistik) terhadap Malaysia (<https://thediplomat.com/2016/09/the-war-that-gave-birth-to-asean/> diakses pada 12 September 2018).

Hubungan kedua negara membaik kembali ketika Soeharto menggantikan Soekarno dari tampuk kekuasaan. Di bawah kepemimpinan Soeharto, hubungan kedua negara semakin erat mengingat arah kebijakan politik dalam negeri Soeharto berorientasi pada anti-komunis dan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia akan fokus pada urusan domestik serta arah kebijakan luar negerinya cenderung anti-komunis dan pro Blok Barat. Kedekatan kedua negara pun dibuktikan dengan dukungan Australia terhadap Indonesia dalam menginvasi Timor Timur pada tahun 1975. Selain itu, pada saat terjadi Krisis Finansial 1997, Australia memberikan bantuan finansial kepada Indonesia sebesar 8.8 juta dollar untuk mengatasi kenaikan harga pangan, pengangguran, dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat (Chalk, 2001: 233).

Hubungan kedua negara berada pada titik terendah pada tahun 1999 setelah referendum Timor-Timur tahun 1999 yang memilih untuk memerdekakan diri dari Indonesia. Dibawah pemerintah John Howard, Australia memimpin pasukan perdamaian *International Force East Timor* (INTERFET) untuk memasuki wilayah

Timor-Timur guna mengembalikan ketertiban dan mencegah terjadinya kekerasan yang lebih lanjut yang dilakukan oleh kelompok Pro-Integrasi dukungan Indonesia. Hal tersebut tidak hanya menimbulkan kemarahan dari elit pengambil kebijakan Indonesia yang melihat sebagai tindakan yang tidak konsisten, namun juga menimbulkan persepsi negatif Indonesiaa terhadap Australia di tingkat akar rumput. Di dalam negeri Australia, kebijakan Howard tersebut dikritik sebagai bentuk kegagalan kebijakan luar negeri Australia (McPhail, 2007). Maka dari itu Australia berusaha memperbaiki hubungan diplomatik kedua negara, baik dengan meningkatkan kerjasama ataupun dengan instrumen diplomasi publik-nya yang dalam penelitian ini fokus pada program MEP.

Dirancangnya program *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program* (MEP) pada tahun 2002 tidak bisa dipisahkan dari konteks keamanan dan dinamika politik internasional. Peristiwa 9/11 mengubah paradigma terhadap ancaman yang tidak lagi berfokus pada aspek tradisional, namun non-tradisional (seperti terorisme). Sebagai respon terhadap serangan 9/11, Amerika Serikat sebagai negara yang menjadi sasaran kelompok Al-Qaeda melakukan tindakan balasan secara unilateral dengan dukungan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) untuk menginvasi Afghanistan (2001) dan Irak (2003). Hal tersebut berkaitan dengan Australia yang merupakan anggota dari NATO dan terlibat dalam invasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat tersebut. Konsekuensinya, Australia (negara dan masyarakatnya) menjadi salah satu negara target serangan kelompok teroris Al-Qaeda. Hal tersebut terbukti dengan adanya serangan terhadap simbol politik dan tempat yang menjadi tujuan wisatawan mayoritas Australia berkunjung, seperti

Bom Bali I (2002), Bom di Kedutaan Besar Australia di Jakarta (2004), dan Bom Bali II (2005) (<https://www.nytimes.com/2005/10/02/world/asia/bali-bombings-kill-at-least-25-in-tourist-spots.html> diakses pada 12 September 2018). Maka dari itu, Australia mencoba mendekatkan kembali hubungannya dengan Indonesia baik di tingkat elit maupun tingkat akar rumput.

Di tingkat elit atau pemerintahan, Australia melakukan kerjasama keamanan dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam bentuk pelatihan, suplai logistik, dan dana operasional – hasil kerjasama kedua negara tersebut menghasilkan unit Detasemen Anti Teror 88 (penggunaan angkut ‘88’ merujuk sebagai bentuk penghormatan terhadap warga Australia yang menjadi korban dalam peristiwa Bom Bali 1 yang berjumlah 88 orang). Sedangkan di tingkat akar rumput yang menjadi objek dalam penelitian ini, Australia menggunakan sarana diplomasi publiknya dengan membuat program *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program*. Secara teknis, program ini meliputi kunjungan selama dua minggu ke Australia oleh tokoh muda Muslim dari Indonesia dan dua minggu ke Indonesia oleh mitra mereka dari Australia. Adapun peserta dari program pertukaran tokoh Muslim ini meliputi berbagai profesi, seperti penulis, jurnalis, akademisi, aktivitas lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi keagamaan (http://indonesia.embassy.gov.au/jakt/MR11_021.html diakses pada 13 Mei 2018).

Keberadaan program MEP yang mengangkat unsur identitas atau religi dapat dilihat dari beberapa perspektif; 1). Australia ingin mengurangi persepsi negatif masyarakat muslim Indonesia terhadap negara-negara Barat akibat invasi Afghanistan (2001) dan Irak (2003) – di mana Australia terlibat didalamnya; 2).

Australia ingin mengubah persepsi negatif menjadi positif dari masyarakat Indonesia terhadap Australia pasca kebijakan luar negeri Australia yang pro pada kelompok FRETELIN tahun 1997; 3). Untuk mempererat hubungan antar akar rumput kedua negara yang menjadi fondasi dalam memelihara hubungan Australia-Indonesia dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, merujuk pada pemaparan dinamika hubungan luar negeri Australia-Indonesia di atas, ditafsirkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Australia memiliki dua dimensi; yakni jangka menengah dan jangka panjang. Dalam konteks jangka menengah, Australia berkepentingan menjaga hubungan baik dengan Indonesia untuk mengatasi berbagai masalah isu bersama (seperti menangkal ancaman dari kelompok terorisme). Sedangkan dalam konteks jangka panjang, Australia tidak ingin hubungan kedua negara berada di titik terendah sebagaimana terjadi pada kepemimpinan John Howard pada tahun 1997, hal tersebut disebabkan karena Indonesia memiliki posisi strategis baik secara politik, geografi, dan ekonomi. Maka dari itu, sejak dirancang pada tahun 2002, Australia tetap memasukan program MEP sebagai salah satu program utamanya yang pendanaannya berasal dari pemerintah Australia.

Kendala awal yang dihadapi oleh pemerintah Australia dalam melaksanakan program AIMEP adalah persepsi negatif terhadap satu sama lain kedua negara di tingkat akar rumput. Sejak Australia mendukung Timor-Timur untuk merdeka, diskursus publik Indonesia didominasi oleh nuansa permusuhan terhadap Australia. Media masa Indonesia pun memberitakan hal-hal negatif tentang Australia sehingga muncul perasaan nasional yang massif pada tahun

2000an tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya gerakan kelompok kanan nasionalis yang cenderung membentuk kelompok paramiliter untuk berkonfrontasi secara fisik dengan Australia. Meskipun persepsi tersebut sangat dominan pada awal kemunculan program AIMEP di tahun 2002, namun secara perlahan – publik Indonesia mulai memandang positif terhadap Australia. Survei yang dilakukan EY Sweeney mengatakan 74% orang Indonesia mengetahui seluk-beluk Australia dan 87% menanggapi Australia sebagai teman (<http://theconversation.com/between-perceptions-and-realities-of-australian-indonesian-attitudes-a-view-from-indonesia-64127> diakses pada 25 September 2018). Hal tersebut berindikasi bahwa persepsi tidak lagi menjadi kendala program AIMEP, namun ancaman kendala program bisa muncul dari perubahan arah kebijakan luar negeri, perubahan rezim dalam negeri Australia, ataupun adanya peristiwa penting yang merubah tatanan dunia.

Pemaparan sekilas tentang *Australia –Indonesia Muslim Exchange Program* (MEP) di atas juga dapat ditafsirkan Australia memberdayakan sumber-sumber kekuatan (*power*) yang dimilikinya untuk mendekati tokoh masyarakat/*stakeholders* Indonesia yang berlatar keyakinan Muslim. Pembentukan program diplomasi publik tidak semata-mata untuk mengubah pandangan negatif dunia Islam terhadap Barat. Namun juga untuk mempererat hubungan kedua negara melalui penguatan hubungan akar rumput yang memiliki nilai tawar strategis sebagaimana dijelaskan pada pemaparan di atas. Hal tersebut bisa diukur dari masih terselenggaranya kegiatan *Australia –Indonesia Muslim Exchange Program* (MEP)

hingga tahun 2018 ini. Namun pada penelitian ini, peneliti hanya akan fokus pada tahun 2016 - 2018 (<https://ausindomep.com> diakses pada 13 Mei 2018).

Kajian-kajian atau penelitian-penelitian tentang hubungan internasional Australia, diplomasi publik, dan posisi Islam dalam Hubungan Internasional telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Berikut dibawah ini akan dipaparkan secara ringkas empat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema, topik, dan objek yang diteliti. Setelah memaparkan keempat penelitian terdahulu tersebut, peneliti akan membuat kesimpulan, lalu akan dijelaskan letak persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Penelitian pertama merupakan artikel ilmiah yang ditulis oleh Hoestrey (2016) dengan judul *Rebranding Islam: Public Diplomacy, Soft Power, and the Making of "Moderate Islam"*, diterbitkan oleh *University of Notre Dame*, di Belanda. Dalam artikelnya, Hoestrey membahas tentang rebranding Islam yang dilakukan oleh Indonesia melalui instrumen diplomasi publik. Dalam penelitiannya, Hoestrey mengangkat perubahan rebrand Islam sebagai ajaran kekerasan menjadi Islam yang penuh akan kedamaian. Kemunculan brand pertama di atas dilatarbelakangi peristiwa 9/11 yang memunculkan persepsi negatif dan Islamophobia di negara-negara Barat. Kondisi tersebut mendorong Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia untuk mengambil peran aktif dalam mengatasi masalah tersebut. Dalam penelitiannya, Hoestrey mensoroti peran masyarakat sipil (Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama) dan tokoh-tokoh agama Islam yang berasal dari Indonesia dalam mempromosikan brand "Islam Moderat". Rebranding Islam yang dilakukan oleh Indonesia tidak hanya ditujukan kepada

negara-negara Barat dengan dialog-dialog antar keagamaan. Namun juga dilakukan terhadap negara-negara Islam itu sendiri. Sebagai contoh, ketika terjadi *Arab Spring*, Indonesia aktif mengadakan *workshop* dengan para politisi Mesir dan Tunisia dengan berbagi pengalaman Indonesia tentang transisi politik dari era otoritarian secara damai. Meskipun Arab Spring pada dasarnya adalah gejolak politik domestik negara-negara Timur Tengah. Namun, hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari fakta bahwa *brand* Islam melekat pada negara-negara tersebut. Oleh karena itu, proses transisi kekuasaan yang dapat akan merepresentasikan Islam sebagai *brand* yang damai.

Penelitian kedua merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Byrne dan Hall (2013: 37 – 41) dengan judul *Realising Australia's International Education as Public Diplomacy*, diterbitkan dalam jurnal *Australia Journal of International Affairs*, di Australia. Dalam jurnalnya, Byrne dan Hall membahas tentang realisasi pendidikan internasional (perguruan tinggi) Australia sebagai instrument diplomasi publik. Dalam penelitiannya, Byrne dan Hall menjelaskan bahwa pendidikan tinggi yang dimiliki oleh Australia telah bertindak sebagai instrument diplomasi publik, yang secara esensi berusaha mendekati dan mempengaruhi publik luar negeri. Pendekatan dan pengaruh tersebut berdampak pada progress pencapaian prioritas kebijakan luar negeri dan kepentingan Australia. Hal tersebut berdampak positif terhadap Australia di mana terdapat pengembangan keilmuwan sosial dan eksakta dalam negeri karena adanya moblisasi pelajar dari seluruh dunia. Selain itu, terdapat peningkatan nilai komersil yang bersumber dari kebutuhan primer dan sekunder pelajar-pelajar asia di Australia. Serta, adanya peningkatakan reputasi Australia

sebagai negara yang patut diperhitungkan dalam aspek pendidikan atau perguruan tinggi. Lebih lanjut Byrne dan Hall menjelaskan pencapaian tersebut tidak bisa dilepaskan dari esensi kekuatan diplomasi yang bersumber pada *soft power*. Australia dinilai berhasil mengoptimalkan dan mengelaborasi sumber-sumber *soft power*-nya, seperti nilai politik, budaya, dan kebijakan luar negeri. Output yang diperoleh dari diplomasi publik menjadi sumber daya bagi Australia untuk meningkatkan pengaruhnya di tingkat regional dan internasional.

Penelitian ketiga merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Fabrycky (2005: 25-30) dengan judul *U.S Public Diplomacy and Religion in The Muslim World*, diterbitkan dalam *The Review of Faith & International Affairs*, di Amerika Serikat. Dalam artikel jurnalnya, Fabrycky membahas tentang diplomasi publik Amerika Serikat dalam mendekati dunia Islam. Dalam penelitiannya, Febrycky berpijak pada hasil survey *Pew Forum* pada tahun 2003 yang membahas persepsi dunia muslim terhadap Amerika Serikat yang semakin menurun. Hasil survey menunjukkan bahwa hanya 21% dari Jordan (representasi Timur Tengah), 23% dari Pakistan, dan 38% dari Indonesia (representasi Asia) yang melihat positif Amerika Serikat. Hal tersebut dinilai memunculkan pandangan anti-amerika di negara-negara yang mayoritas muslim. Kemunculan gerakan tersebut merupakan dampak dari kebijakan invasi Amerika Serikat ke Irak dan Afghanistan. Merujuk pada kondisi demikian, pemerintah Amerika Serikat berusaha untuk mendekati dunia Islam dengan instrument diplomasi publik. Penggunaan diplomasi publik didasarkan pada keterbatasan diplomasi tradisional yang hanya fokus pada elit-elit negara. Dengan adanya adanya diplomasi publik, upaya mendekati dapat bersifat lebih cair karena

menekankan pada aktor akar rumput (aktor non-negara). Aktivitas diplomasi publik Amerika pada tahun 2005 tersebut menekankan pada pencarian persamaan (*the search for common ground*) antara Amerika dan dunia Islam. Fabrycky mengasumsikan dengan ditemukannya kesamaan antar dua entitas akan memudahkan dalam membangun pemahaman satu sama lain.

Persamaan terletak pada fokus penelitian dengan upaya menjelaskan diplomasi publik yang dilakukan oleh negara dengan memposisikan Islam dan masyarakat luar negeri sebagai aspek strategisnya. Lebih lanjut, persamaan lain terletak pada penggunaan konsep *soft power* dan diplomasi publik dalam menjelaskan upaya diplomasi publik melalui program pertukaran muslim kedua negara. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas, peneliti dalam penelitian ini memfokuskan pada diplomasi publik yang dilakukan Australia terhadap Indonesia melalui *Australia –Indonesia Muslim Exchange Program* pada tahun 2016 - 2018. Beberapa peristiwa signifikan (seperti sejarah hubungan diplomatik Australia-Indonesia dan perkembangan persepsi Barat dan Islam) akan dijadikan acuan untuk menarik gambaran umum dalam dinamika interaksi tersebut. Dalam hal ini lah, penelitian-penelitian tersebut akan memberikan penjelasan mengenai peristiwa-peristiwa tersebut sehingga memberikan gambaran umum tentang hubungan Australia-Indonesia dan kaitannya dengan dunia Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul sebagai berikut:

**“DIPLOMASI PUBLIK AUSTRALIA TERHADAP INDONESIA
MELALUI AUSTRALIA –INDONESIA MUSLIM EXCHANGE PROGRAM
TAHUN (2016 – 2018)”**

Penelitian ini berangkat dari landasan perkuliahan pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Perkuliahan yang mendukung penelitian ini adalah:

1. Hubungan Internasional di Asia Pasifik, dalam mata kuliah ini mempelajari interaksi yang dilakukan antar negara di kawasan Asia Pasifik. Adapun fokus yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengkajian terhadap upaya Australia dalam meningkatkan posisi politis dan strategisnya di kawasan Asia Pasifik, secara khusus melihat upaya penguatan hubungan Australia-Indonesia.
2. Diplomasi dan Negosiasi, mata kuliah ini mengkaji aspek diplomasi dan negosiasi yang dilakukan oleh negara melalui diplomasi tradisional ataupun diplomasi publik. Pada penelitian ini akan dilihat diplomasi publik Australia untuk mempromosikan kepentingan nasionalnya terhadap Indonesia melalui program pertukaran tokoh-tokoh muslim kedua negara.
3. Islam dalam Hubungan Internasional, mata kuliah ini mengkaji Islam sebagai salah satu entitas atau identitas politik yang memiliki posisi strategis dan daya tawar tinggi dalam hubungan internasional. Pada penelitian ini, Australia melihat keberadaan Islam sebagai bagian dari Indonesia memiliki posisi yang penting dalam mempererat hubungan kedua negara.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengajukan perumusan masalah dengan pertanyaan penelitian (*research question*) seperti berikut:

“Bagaimana Diplomasi Publik Australia Terhadap Indonesia melalui *Australia –Indonesia Muslim Exchange Program Tahun 2016 – 2018* ?”

1.2.2. Rumusan Masalah Minor

Dari perumusan masalah umum tersebut, peneliti akan mengajukan tiga pertanyaan penelitian khusus seperti berikut:

1. Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh program AIMEP dari tahun 2016 - 2018 ?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program AIMEP yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia ?
3. Bagaimana hasil pelaksanaan *Australia –Indonesia Muslim Exchange Program* Tahun 2016 - 2018 dalam diplomasi publik Australia terhadap Indonesia ?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi kajian permasalahan hanya pada kegiatan *Muslim Exchange Program* pada tahun 2016 - 2018 saja. Meskipun demikian, peneliti akan memberikan gambaran umum perkembangan program AIMEP dari tahun 2002 – 2018 sebagai gambaran dasar dalam memahami AIMEP dari periode 2016 - 2018.

Adapun alasan memilih tahun tersebut karena ingin melihat kebaruan hubungan Australia-Indonesia di tingkat akar rumput, khususnya hubungan antar tokoh Muslim kedua negara.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan mengkaji Diplomasi Publik Australia Terhadap Indonesia melalui Australia –Indonesia Muslim Exchange Program Tahun 2016 - 2018.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh program AIMEP dari tahun 2016 - 2018.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang yang dihadapi dan evaluasi apa saja yang diperoleh dalam pelaksanaan program AIMEP yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia.
3. Untuk mengkaji hasil pelaksanaan *Australia –Indonesia Muslim Exchange Program* Tahun 2016 - 2018 terhadap hubungan diplomasi Australia dan Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk mengoperasionalkan konsep negara, *soft power*, dan diplomasi publik dalam menjelaskan pelaksanaan diplomasi publik Australia terhadap Indonesia melalui *Australia –Indonesia Muslim Exchange Program* Tahun 2016 - 2018.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagaimana berikut:

1. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat umum dan para pengambil kebijakan terkait pelaksanaan diplomasi publik Australia di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Indonesia.
2. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat umum dan para pengambil kebijakan bahwa kegiatan diplomasi publik Australia melalui pertukaran individu yang pelaksanaannya dilakukan oleh aktor non-negara (dalam hal ini lembaga pendidikan/Universitas Paramadina dan individu) memiliki tujuan politik untuk mempererat hubungan Australia-Indonesia.
3. Menjadi referensi dalam pengembangan keilmuan Studi Hubungan Internasional, khususnya mata kuliah Hubungan Internasional di Asia Pasifik, serta Diplomasi dan Negosiasi.